

# IMPLEMENTATION OF POOR RICE IMPLEMENTATION IN KENEP VILLAGE LOCERET SUB DISTRICT NGANJUK REGENCY

Sinta Amelia Harfianti

## ABSTRACT

Raskin is one of the government's policy for the welfare of the poor and reduce poverty. Villages that received assistance Raskin is Kenep Village District Loceret Nganjuk. During the program there were indications of problems in its implementation. From year to year the problems and the uneven distribution of the amount of rice received incompatibility with pre-determined. Distribution of rice which are not effective should be addressed to the RTM (Poor Households) but poor distribution of rice in the village of RTM Kenep not only for the public but also get Raskin. This research uses descriptive study with a qualitative approach.

Based on the analysis of data on the Implementation of the Rural Kenep Raskin District Loceret by Edward III implementation model can be concluded as follows: (1) Communication between implementers and target groups through the process of socialization in the Village Hall. While the implementor communication between actors at a lower level and upper level are less well established. So that the implementer makes a deal with the community to equalize the number of Raskin. (2) The resources in the Village Kenep Raskin program is limited. This is indicated by the amount of rice that is not proportional to the poor. In terms of quantity by weight / quantity of rice is still lacking and do not include all of the poor. While the facilities of infrastructure is sufficient. (3) Disposition Raskin program in the Village District Kenep Loceret Nganjuk of attitude has been well addressed in this case because the entire executive Raskin perform their duties properly and earnestly so what is the Raskin program objectives can be realized. The existence of jealousy can be overcome because people made an agreement about the distribution of the number of recipients Raskin. (4) Bureaucratic Structure Raskin program in the Village District Kenep Loceret Nganjuk include Standard Operating Procedures (SOP) are clear that until the start of the rice in each village to get to the resident beneficiaries Raskin and fragmentation (accountability) are in the form of a report by month, receipts and money from the sale of each end of the month.

Suggestions can be submitted several issues regarding the implementation of the program in the village Kenep Raskin is as follows: a need for updating or rationalization targets Raskin recipients so that there is conformity anantara Raskin number of recipients by the number of poor people, openly inform the recipient criteria Raskin to overcome jealousy and conflict, increase awareness of citizens who do not receive Raskin to let the poor benefit from the rice, increase the quality and quantity of rice distributed

Keywords : Implementation, Program, Poor Rice

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA KENEP  
KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

Sinta Amelia H (084674215)

Weni Rosdiana S.Sos, MAP (N.I.P 19790923 200912 2003)

ABSTRAK

Program Raskin adalah salah satu kebijakan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat miskin dan menanggulangi kemiskinan. Desa yang menerima bantuan raskin adalah Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Selama berlangsungnya program terdapat indikasi adanya masalah dalam implementasinya. Dari tahun ke tahun mengalami permasalahan yaitu distribusi yang kurang merata dan ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima dengan yang sudah ditentukan. Pembagian beras yang tidak tepat sasaran seharusnya ditujukan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) tetapi pembagian beras miskin di Desa Kenep tidak hanya untuk RTM melainkan masyarakat umum juga mendapatkan raskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data mengenai Implementasi Program Raskin pada Desa Kenep Kecamatan Loceret dengan menggunakan model Implementasi Edward III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran melalui proses sosialisasi di Balai Desa. Sedangkan komunikasi implementor antara pelaku di level bawah dan level atas kurang terjalin dengan baik. Sehingga implementator membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk pemerataan jumlah raskin. (2) Sumber daya program Raskin di Desa Kenep terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah beras yang tidak sebanding dengan warga miskin. Dari segi kuantitas berat/jumlah beras masih kurang dan belum mencakup semua warga miskin. Sedangkan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai. (3) Disposisi program raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dari sikap yang ditujukan sudah baik hal tersebut dikarenakan seluruh pelaksana raskin melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan program raskin dapat diwujudkan. Adanya kecemburuan sosial dapat teratasi karena warga membuat kesepakatan bersama tentang pemerataan jumlah penerima raskin. (4) Struktur Birokrasi program raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk meliputi Standar Operasional Procedures (SOP) yang jelas mulai dari beras yang sampai di tiap-tiap desa hingga sampai kepada warga penerima manfaat raskin dan fragmentasi (pertanggungjawaban) yang baik berupa laporan tiap bulan, kwitansi dan uang hasil penjualan tiap akhir bulan.

Saran yang dapat disampaikan beberapa hal mengenai implementasi program raskin ada di Desa Kenep adalah sebagai berikut : Diperlukan adanya pembaharuan data atau rasionalisasi sasaran penerima raskin sehingga terdapat kesesuaian anatara jumlah penerima raskin dengan jumlah masyarakat miskin, menginformasikan secara terbuka kriteria penerima raskin untuk mengatasi kecemburuan sosial dan konflik, meningkatkan kesadaran warga masyarakat yang tidak menerima raskin untuk merelakan masyarakat miskin menerima manfaat beras itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas beras yang di distribusikan.

*Kata Kunci : Implementasi, program, Beras Miskin*

## BAB I

### PENDAHULUAN

Implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan: Bahkan Udoji (1981:32) dengan tegas mengatakan bahwa *'the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file unless they are implemented'* (pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). (Wahab, 2002).

Salah satu Implementasi Kebijakan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat miskin dan menanggulangi kemiskinan adalah Program Raskin. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menyatakan bahwa Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

([www.wikiapbn.org/artikel/Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008](http://www.wikiapbn.org/artikel/Instruksi_Presiden_Nomor_8_Tahun_2008)).

Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat

membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012).

Salah satu Desa yang menerima bantuan raskin adalah Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Program raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk berlangsung semenjak tahun 1998 sampai sekarang. Selama berlangsungnya program tersebut dari tahun ke tahun mengalami permasalahan yang hampir sama dalam pelaksanaannya, yaitu distribusi yang kurang merata dan ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima dengan yang sudah ditentukan. Pembagian beras yang seharusnya ditujukan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) tetapi pembagian beras miskin di Desa Kenep tidak hanya untuk RTM melainkan masyarakat umum juga mendapatkan raskin.

Berdasarkan paparan di atas maka terdapat indikasi awal adanya masalah dalam Implementasi Kebijakan Raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian "Implementasi Program Raskin Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kenep Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk."

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam

##### Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George Edward untuk menganalisis Implementasi Program Beras Miskin di Desa Kenep. Hal tersebut di dasarkan

pertimbangan adanya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Raskin. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (Widodo, 2007:96-110), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain adalah faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

## 2. Kesmiskinan

Teori kemiskinan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar menganalisis pelaksanaan kebijakan raskin sehingga dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan implementasi kebijakan. Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2003) dalam Suharto (2009:15-16) mengemukakan kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.

- a) Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
- b) Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari suatu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu

komunitas ke komunitas lainnya dalam suatu negara.

- c) Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (social exclusion), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi. Perangkap Kemiskinan Menurut Chambers

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. "Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (Nawawi, 1995:3e1)." Hasil penelitiannya lebih ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Dengan kata lain, peneliti berusaha untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Kenep Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan mendapatkan data yang

diperlukan. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu Desa Kenep Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Raskin berdasarkan teori model implementasi George Edward III dengan indikator-indikator di bawah ini :

- a. Komunikasi  
Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
- b. Komunikasi  
Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
- c. Sumber Daya  
Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.
- d. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari :

- a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara.
- b. Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara (interview)  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”, (Moleong, 2005:186).
2. Dokumentasi  
Merujuk dari pendapat Arikunto (2006:158) pengertian dokumentasi adalah barang-barang tertulis.

## **E. Teknik Analisis Data**

Kegiatan analisis data adalah kelanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai “Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”, (Nawawi, 1995:63)

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. HASIL

##### 1. Gambaran Umum Program Raskin

###### a. Dasar Hukum Pelaksanaan Raskin

Program beras untuk keluarga miskin atau yang biasa dikenal dengan istilah Raskin adalah program pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada keluarga miskin atau rawan pangan melalui pendistribusian bahan pangan pokok (beras). Melalui program Raskin diharapkan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin dan secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan produktivitas pada keluarga miskin. Dasar-Dasar Hukum Program Raskin yang menjadi

landasan pelaksanaan program raskin adalah :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
5. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985.
6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
10. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
11. Inpres Nomor 8 tahun 2 008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
12. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang <sup>3</sup>Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi raskin pusat

b. Tujuan Raskin

Tujuan dari Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/RTS-PM/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/Kg di titik distribusi.

c. Sasaran

Sasaran penerima Program Raskin adalah keluarga miskin di desa atau kelurahan yang berhak menerima beras Raskin. Sebagai hasil seleksi berdasarkan musyawarah desa atau kelurahan menggunakan referensi di dasarkan data BPS (keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi).

d. Kriteria

Secara kriteria BPS telah memiliki standar keluarga yang masuk kategori miskin yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti emas, ternak, kapal motor, atau barang modal. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

e. Alur

Penyaluran RASKIN berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG, dalam hal ini kepada Kadivreg/ Kasubdivreg/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN (tonase dan jumlah Rumah Tangga Sasaran - RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker RASKIN. Satker RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi.

f. Indikator

Menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2007) ada lima indikator yang mempengaruhi keberhasilan penyaluran program Raskin, yaitu:

1. Tepat Sasaran penerima manfaat.  
Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau dalam bentuk lain).
2. Tepat Jumlah  
Jumlah beras Raskin yang merupakan hak penerima

Manfaat adalah sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 12 bulan.

3. Tepat Harga  
Harga beras Raskin adalah sebesar Rp.1000/kg netto dititik Distribusi
4. Tepat Waktu.  
Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi.
5. Tepat Kualitas.  
Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

2. Gambaran Umum Lokasi

a. Deskripsi Lokasi

Desa Kenep terletak di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 128,1 ha terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kenep, Dusun Glagahan, dan Dusun Dukuhan. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Nglaban
- b. Sebelah Timur : Desa Putuk Rejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Banaran
- d. Sebelah Barat : Desa Sekaran

B. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran

rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras, maka pemerintah mengeluarkan program raskin yang ditujukan untuk warga yang kurang mampu. Program raskin merupakan sebuah program bantuan pangan bersyarat di selenggarakan oleh pemerintah Indonesia berupa penjualan beras dibawah harga pasar kepada penerima yang sudah ditentukan.

Proses implementasi telah dijabarkan dengan jelas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Raskin. Terdapat tim pelaksana raskin yang dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, selain itu perangkat-perangkat desa seperti halnya Kepala Desa, RT, dan aparat desa lainnya. Masing-masing pihak pelaksana memiliki tugas dan fungsi yang berbeda akan tetapi dalam hal ini masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan dan mewujudkan tujuan Raskin sehingga mencapai tujuan yang dicapai. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Widodo (2007:91) bahwa tahap pengorganisasian adalah tahapan yang mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan atau penentuan lembaga organisasi.

Program yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012. Program Raskin merupakan sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah

Indonesia berupa penjualan beras dibawah harga pasar kepada penerima tertentu. Program Raskin dalam penelitian ini dilaksanakan di Deas Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Target group (kelompok sasaran) Raskin ini adalah masyarakat miskin khususnya warga miskin yang tidak mampu.

Secara umum, selama pelaksanaan Program Raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa efektivitas program masih relatif lemah. Hal ini ditandai oleh kesadaran masyarakat akan fungsi raskin. Banyak masyarakat mampu masih mengharapkan diberi bantuan raskin. Sosialisasi mengenai program Raskin telah disampaikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012. Walaupun ada informasi tertentu yang kurang jelas namun warga telah ada yang protes secara radikal. Ada sedikit kecemburuan sosial pada masyarakat non RIM menyebabkan adanya sedikit keresahan. Dan setelah dirembug ulang akhirnya disepakati bahwa Raskin dibagi rata. Informasi ini melegakan masyarakat walaupun sebenarnya melanggar Pedum

#### a. Komunikasi

George Edward III dalam Widodo (2007:97) menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan public disampaikan kepada pelaku kebijakan dengan maksud agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui

dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan. Untuk itu perlu adanya kejelasan dan konsistensi sehingga menghasilkan suatu implementasi yang baik dalam mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti halnya dengan program Raskin.

Sosialisasi program Raskin merupakan salah satu cara mencapai keberhasilan, sehingga kegiatan penting ini dilakukan secara berkala. Sosialisasi program Raskin dilakukan oleh fasilitator Kecamatan yakni bagian pelayanan umum di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi dilakukan melalui musyawarah desa dengan perangkat dan aparatur desa serta tokoh masyarakat setempat juga diajak beberapa warga penerima Raskin sebelumnya yang bertujuan untuk ikut mengawasi jalannya program Raskin pada Kecamatan Loceret.

#### b. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2007:97) mengemukakan bahwa faktor sumber daya adalah sumber yang sangat penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Program Raskin akan dikatakan berhasil apabila memiliki sumber daya yang memadai, baik staf, informasi, wewenang maupun fasilitas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung diketahui bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Raskin di Desa Kenep adalah Kepala Dusun Kenep yaitu

Bapak Marjani yang di bantu oleh dua staff yang di pilihnya. Pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan saat di beri perintah. Pihak pelaksana dapat bekerjasama dengan masing-masing pihak baik dari pihak kecamatan, desa atau RT serta pihak-pihak lainnya yang membantu.

#### c. Disposisi

Edward III dalam Widodo (2007:104) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga ditentukan oleh kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan hal ini dapat terlihat dari kesungguhan para pelaksana program Raskin di desa Kenep yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Komitmen pegawai dalam hal ini adalah konsistensi pihak pelaksana program Raskin terhadap tugas yang diberikan. Pihak pelaksana melaksanakan pekerjaan program Raskin sesuai dengan tugas masing-masing dalam hal ini telah dilakukan oleh pelaksana program Raskin di desa Kenep. Para pihak pelaksana selalu berkomitmen atas pekerjaannya terlihat dari sikap profesional dan ramah saat melayani warga sehingga pelaksanaan program Raskin dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil dari wawancara menunjukkan bahwa petugas Raskin telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga

masyarakat penerima raskin merasa nyaman dan tidak ada keluhan. Komitmen yang ditunjukkan para implementator di Desa Kenep beserta warganya sangat mendukung terlaksananya program raskin ini dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2007:106) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bisa saja masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan dari struktu birokrasi. Terdapat cakupan aspek-aspek dalam struktur birokrasi, yaitu Standars Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi atau pertanggungjawaban.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Seperti halnya program raskin yang ditunjukkan di semua wilayah harus jelas, karena hal ini akan mempengaruhi keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan. Dibentuknya tim pengelolaan dan pengorganisasian di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa menunjukkan adanya keseriusan melaksanakan program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Keteraturan program dapat dilihat dari tepatnya proses pembayaran raskin desa ke kecamatan lalu disalurkan kepada bulog maksimal tiga hari setelah beras datang di desa Kenep. Petunjuk teknis operasional raskin tidak hanya sekedar dijadikan sebuah dokumen saja tetapi lebih dari itu birokrasi harus mampu dan sanggup melaksanakannya agar tampak nyata bahwa program raskin

bukan program yang dijalankan karena adanya keharusan dari peraturan yang telah ditetapkan oleh departemen dalam negeri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai Implementasi Program Raskin pada Desa Kenep Kecamatan Loceret dengan menggunakan model Implementasi Edward III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran melalui proses sosialisasi di Balai Desa. Sedangkan komunikasi implementor antara pelaku di level bawah dan level atas kurang terjalin dengan baik. Sehingga implementator membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk pemerataan jumlah raskin.
2. Sumber daya program Raskin di Desa Kenep terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah beras yang tidak sebanding dengan warga miskin. Dari segi kuantitas berat/jumlah beras masih kurang dan belum mencakup semua warga miskin. Sedangkan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai.
3. Disposisi program raskin di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dari sikap yang ditujukan sudah baik hal tersebut

dikarenakan seluruh pelaksana raskin melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan program raskin dapat diwujudkan. Adanya kecemburuan sosial dapat teratasi karena warga membuat kesepakatan bersama tentang pemerataan jumlah penerima raskin.

4. Struktur Birokrasi program raskin di Desa Kenep Kecamatan Iloceret Kabupaten Nganjuk meliputi Standar Operasional Procedures (SOP) yang jelas mulai dari beras yang sampai di tiap-tiap desa hingga sampai kepada warga penerima manfaat raskin dan fragmentasi (pertanggungjawaban) yang baik berupa laporan tiap bulan, kwitansi dan uanghasil penjualan tiap akhir bulan.

#### B. Saran

Saran yang dapat disampaikan beberapa hal mengenai implementasi program raskin ada di Desa Kenep adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya pembaharuan data atau rasionalisasi sasaran penerima raskin sehingga terdapat kesesuaian antara jumlah penerima raskin dengan jumlah masyarakat miskin.

2. Menginformasikan secara terbuka kriteria penerima raskin untuk mengatasi kecemburuan sosial dan konflik
3. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat yang tidak menerima raskin untuk merelakan masyarakat miskin menerima manfaat beras itu

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Huraerah, Abu. 2006. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan*

- Strategi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Kerakyatan. Bandung: Humaniora. Media.*
- Pedoman Umum Penyaluran Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Raskin. 2012. Publik. Malang. Bayumedia Publishing.*
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. [www.wikiapbn.org/artikel/Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008](http://www.wikiapbn.org/artikel/Instruksi_Presiden_Nomor_8_Tahun_2008)*
- Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta. [www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15](http://www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15)*
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan model-model <http://abdiprojo.blogspot.com>*